

**MOTIF INDONESIA DALAM KERJA SAMA INDUSTRI
PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK (TAHUN 2011-2021)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan
Internasional**



Disusun Oleh:

Ruth Sonia Octasha Br. Pangaribuan

07041281823110

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
“MOTIF INDONESIA DALAM KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN
DENGAN TIONGKOK (TAHUN 2011-2021)”

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:
RUTH SONIA OCTASHA BR. PANGARIBUAN
07041281823110

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, M.M
NIP. 195905201985032003



Pembimbing II

Gunawan Lestari, S.IP., MA
NIP. 198405182018031001



Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,



Sofyan Effendi, S.IP., M. Si
NIP.197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**MOTIF INDONESIA DALAM KERJA SAMA INDUSTRI
PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK (TAHUN 2011-2021)**

Skripsi

Disusun oleh:

RUTH SONIA OCTASHA BR. PANGARIBUAN
07041281823110

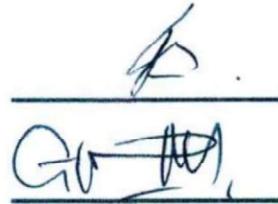
Telah dipertahankan di depan Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 2023

Pembimbing

1. Dra. Retno Susilowati, M.M
NIP 195905201985032003
2. Gunawan Lestari, S.IP., M.A
NIP 198405182018031001

Tanda Tangan



Penguji

1. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
NIP 199208272019031005
2. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010



Dekan FISIP UNSRI



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Program Studi



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruth Sonia Octasha Br. Pangaribuan

NIM : 07041281823110

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Motif Indonesia dalam Kerja Sama Industri Pertahanan dengan Tiongkok (Tahun 2011-2021)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak

Palembang, 1 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Ruth Sonia Octasha

NIM. 07041281823110

ABSTRAK

Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 2011, hampir sebagian besar penyelenggaraan sistem pertahanan dalam negeri Indonesia didukung oleh pengadaan alutsista dari luar negeri yang didatangkan dengan sistem beli-import. Kondisi ini merupakan dampak langsung dari kinerja Industri Pertahanan dalam negeri yang masih terbatas. Untuk itu, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengeluarkan kebijakan kerja sama Industri Pertahanan untuk mendorong upaya peningkatan dan pengembangan Industri Pertahanan dalam negeri agar mampu untuk memenuhi kebutuhan alat-alat pertahanan secara mandiri. Kerja sama dilakukan dengan Tiongkok sebagai mitra, yang diharapkan dapat memberi keuntungan baik bagi pihak Indonesia maupun Tiongkok sendiri. Penelitian ini pun akan berfokus pada apa saja motif Indonesia dalam menjalin kerja sama tersebut. Teori yang digunakan adalah teori technonationalist impulse, dimana melalui teori ini tidak hanya akan menganalisis aspek militer tetapi juga pada aspek ekonomi dan aspek citra/status. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data yang kemudian akan dianalisis. Data dikumpulkan dengan teknik studi literature yaitu melalui data secondary seperti jurnal, buku, ataupun website resmi pemerintahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adapun motif Indonesia dalam kerja sama industri pertahanan yang dilakukan dengan Tiongkok pada tahun 2011-2021 terbagi dalam tiga aspek yaitu kekuatan militer, ekonomi, dan citra/status. Motif dalam aspek militer yaitu pencapaian akumulasi power melalui penambahan logistic senjata. Pada aspek ekonomi yaitu adanya keuntungan ekonomi yang diterima oleh Indonesia, baik berupa pengurangan biaya anggaran maupun munculnya industri baru didalam negeri. Pada aspek citra/status, kerja sama ini diharapkan bisa membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri, yang kemudian akan mempengaruhi citra Indonesia ditatanan Internasional sebagai negara dengan sistem pertahanan yang stabil.

Kata kunci: kerja sama pertahanan, industri pertahanan, sistem pertahanan

Pembimbing I



Dra. Retno Susilowati, M.M
NIP. 195905201985032003

Pembimbing II



Gunawan Lestari, S.IP., MA
NIP. 198405182018031001

Ketua Program Studi



Sofyan Effendi, S.IP., M. Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

From the beginning of independence until 2011, most of the implementation of Indonesia's domestic defense system was supported by the procurement of defense equipment from abroad which was imported using a buy-import system. This condition is a direct impact of the performance of the domestic Defense Industry which is still limited. For this reason, in 2011, the Indonesian government through the Ministry of Defense issued a Defense Industry cooperation policy to encourage efforts to increase and develop the domestic Defense Industry so that it is able to meet the need for defense equipment independently. Cooperation is carried out with China as a partner, which is expected to provide benefits for both Indonesia and China itself. This research will also focus on Indonesia's motives for establishing this cooperation. The theory used is the technonationalist impulse theory, through which this theory will not only analyze military aspects but also economic aspects and prestige aspects. This study uses qualitative methods, by collecting data which will then be analyzed. Data was collected using literature study techniques, namely through secondary data such as journals, books, or official government websites. The results of this study indicate that Indonesia's motives for the defense industry cooperation carried out with China in 2011-2021 are divided into three aspects, namely military strength, economy, and prestige. The motive in the military aspect is the achievement of accumulation of power through the addition of weapons logistics. On the economic aspect, namely the existence of economic benefits received by Indonesia, both in the form of reducing budget costs and the emergence of new industries in the country. In the aspect of image/status, this cooperation is expected to be able to build the independence of the domestic defense industry, which will then affect Indonesia's prestige in the international order as a country with a stable defense system.

Keywords: *defense cooperation, defense industry, defense system*

Advisor I



Dra. Retno Susilowati, M.M
NIP. 195905201985032003

Advisor II



Gunawan Lestari, S.IP., MA
NIP. 198405182018031001

Head of Department



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang ditulis oleh penulis adalah **“MOTIF INDONESIA DALAM KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK (TAHUN 2011-2021)”** yang ditulis dalam memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang senantiasa telah membantu, memberikan semangat, motivasi, saran serta kritik dari awal proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang yang teramat penulis sayangi dan hormati, yang itu orang tua penulis atas segala motivasinya, telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis disaat susah maupun senang, telah mengajarkan banyak hal yang mungkin belum tentu penulis dapatkan dimana pun, yang selalu menjaga penulis dari kecil hingga dewasa serta selalu mengingatkan penulis akan hal-hal baik yang harus diterapkan selama penulis hidup.
2. Adik kesayangan penulis satu-satunya yaitu Raja Sondika Farel, yang menjadi teman penulis dimana pun dan kapan pun.
3. Opung, penulis persembahkan skripsi ini untuk Opung yang selama ini sudah banyak memberikan petuah bermakna untuk penulis, serta pesan yang tentunya penulis akan selalu ingat sampai kapan pun.

5. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. beserta seluruh jajaran staf;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si beserta seluruh jajaran staf;
7. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Sc;
8. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM., dan Bapak Gunawan Lestari Elake,, S.IP., MA., selaku dosen pembimbing penulis, yang selalu meluangkan waktu bagi penulis ditengah kesibukan beliau dalam mengajar dan juga penelitian, saran maupun masukan beliau berikan kepada penulis, serta pastinya bimbingan ataupun dorongan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya.
9. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.,IP., MA dan bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan banyak saran maupun masukan bermanfaat bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.
10. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah mengajarkan banyak hal tidak hanya ilmu yang bermanfaat dibagikan tetapi juga pandangan akan hidup kedepannya dan pastinya seluruh staf administrasi jurusan yang telah banyak membantu dari awal semester 1 hingga sekarang pemberkasan akan yudisium.
11. Seluruh atasan serta jajaran staff Kementerian Pertahanan khususnya Direktorat Potensi Pertahanan yang telah menerima dan membantu penulis

dalam penyelesaian pelaksanaan KKHI hingga pembuatan laporan magang KKHI.

12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang, 1 Agustus 2023



Ruth Sonia Octasha Pangaribuan
NIM. 07041281823110

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.3.1. Tujuan Objektif.....	13
1.3.2. Tujuan Subjektif.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Landasan Teori/Konsep.....	21
2.2.1. Konsep <i>Techno-nationalist Impulse</i>	21
2.3. Kerangka Pemikiran.....	25
2.4. Argumen Utama.....	26
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Desain Penelitian.....	28
3.2. Definisi Konsep.....	28
3.2.1. Kerjasama Pertahanan.....	28
3.2.2. <i>Techno-nationalit Impulse</i>	29
3.3. Fokus Penelitian.....	30
3.4. Unit Analisis.....	31
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	32

3.5.1.	Jenis Data	32
3.5.2.	Sumber Data.....	32
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	33
3.7.	Teknik Keabsahan Data	33
3.8.	Teknik Analisa Data	33
3.8.1.	Reduksi Data	34
3.8.2.	Verifikasi / Pengambilan Kesimpulan	34
BAB IV	GAMBARAN UMUM.....	35
4.1.	Industri Pertahanan	35
4.1.1.	Kondisi Industri Pertahanan Indonesia	37
4.1.2.	Kondisi Industri Pertahanan Tiongkok	44
4.2.	Hubungan Diplomasi Indonesia – Tiongkok dalam Bidang Pertahanan.....	48
4.2.1.	Kerjasama Aktivitas Pertahanan Indonesia-Tiongkok	50
4.2.2.	Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Tiongkok.....	51
BAB V	PEMBAHASAN.....	54
5.1.	Pursuit of Power	54
5.1.1.	Pengadaan Logistik Alutsista	58
5.1.2.	Transfer Teknologi	61
5.2.	Pursuit of Wealth.....	68
5.2.1.	Keuntungan Ekonomi.....	70
5.2.2.	Industrialisasi.....	74
5.3.	Pursuit of Prestige	78
5.3.1.	Keunggulan Teknologi.....	79
5.3.2.	Kemandirian Industri Pertahanan	82
BAB VI	87
PENUTUP	87
6.1.	Kesimpulan	87
6.2.	Saran.....	88
6.2.1.	Saran Teoritis.....	88
6.2.2.	Saran Praktis	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tiongkok Military expenditure as a percentage of GDP	45
Tabel 5.1 Penerimaan Pengadaan Logistik Alutsista oleh Indonesia melalui Kerja Sama Industri Pertahanan dengan Tiongkok	67
Tabel 5.2 Perbandingan harga Rudal TNI AL untuk Tahun 2010-2014	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Gambar QW-3 Missile	60
Gambar 5.2 Gambar Rudal C-705	65

DAFTAR SINGKATAN

AD: Angkatan Darat

AL: Angkatan Laut

APEC: *Asia Pacific Economic Cooperation*

AS: Amerika Serikat

DICM: *Defence Industry Cooperation Meeting*

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

DTIB: *Defence Technology Industrial Base*

GDP: *Gross Domestic Product*

IPTEK: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

KCR: Kapal Cepat Rudal

KFX:

KKIP: Komite Kebijakan Industri Pertahanan

KRI: Kapal Republik Indonesia

LAPAN: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

MBT: *Main Battle Tank*

MoU: *Memorandum of Understanding*

NKRI: Negara Kesatuan Republik Indonesia

NPC: *National Paralympic Committee*

PDB: Produk Domestik Bruto

PLA: *People's Liberation Army*

PLAAF: *People's Liberation Army Air-Force*

RI: Republik Indonesia

RSIS: Reference, Special, and Information Section

SASTIND: State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence

SSP: Syarat – syarat Tipe

SST: Syarat – syarat Penerimaan

TNI: Tentara Nasional Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pertahanan Negara diartikan sebagai upaya perwujudan salah satu tujuan nasional negara, yang secara garis besar didalamnya meliputi penegakan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI beserta keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer ataupun ancaman bersenjata. Adapun dalam perwujudannya, upaya pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan kekuatan militer nasional yaitu TNI. Sebagai instrumen pelaksana sistem pertahanan nasional, TNI memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dimana hal-hal tersebut bisa meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas pelatihan, alat instruksi, dan sebagainya. Dalam hal terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sistem pertahanan dalam negeri, TNI masih mengalami banyak hambatan.

Terkait masalah-masalah dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dalam negeri, salah satu langkah Indonesia untuk mendukung upaya penegakan pertahanan adalah dengan menjalin kerja sama pertahanan dengan negara lain, khususnya bidang Industri Pertahanan. Kerja sama pertahanan antar negara sebenarnya merupakan situasi yang tidak bisa dihindari, karena ketidak tentuan lingkungan strategis serta terdapatnya kesamaan kepentingan strategis telah mengharuskan negara-negara dalam lingkungan internasional untuk saling

berkompromi dan berdiplomasi guna mencapai kepentingan ataupun menanggulangi masalah-masalah di wilayahnya masing-masing.

Seiring dengan fenomena globalisasi industri pertahanan, dan adanya masalah serta kepentingan strategis dalam negeri, kerja sama dalam bidang industri pertahanan dengan negara lain tentu harus diterapkan oleh Indonesia demi mencapai sistem pertahanan dan keamanan yang kuat. Khususnya jika bicara dalam konteks global, salah satu ancaman paling besar terhadap kedaulatan suatu negara adalah perkembangan teknologi. Inilah mengapa teknologi pertahanan sering dilihat sebagai kemampuan suatu negara untuk merespon tuntutan maupun ancaman yang datang. Dalam hal mewujudkan sistem pertahanan yang kuat dan mandiri, Indonesia pun memilih Tiongkok sebagai salah satu mitra dalam membangun kekuatan militer dan pertahanannya. Selain itu, kerja sama pertahanan dengan Tiongkok juga diharapkan bisa menjadi pilihan strategis dalam melanjutkan hubungan bilateral kedua negara.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok sebenarnya sudah terbangun sejak tahun 1950 menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara pertama yang menjalin hubungan bilateral dengan Tiongkok. Puncak hubungan diplomatik antara Indonesia – Tiongkok terjadi ketika kedua negara masing-masing sepakat untuk menandatangani *Strategic Partnership* atau Deklarasi Kemitraan Strategis pada 25 April 2005. Sejalan dengan disepakatinya Deklarasi Kemitraan Strategis, hubungan bilateral Indonesia – Tiongkok dalam bidang pertahanan juga semakin diperkuat. Selain itu peningkatan hubungan bilateral khususnya di bidang pertahanan dengan Tiongkok juga searah dengan upaya negara dalam peningkatan kemampuan pertahanan dalam negeri. Sedangkan

kerja sama yang secara khusus terkait Industri Pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok dijalin tepatnya pada tahun 2011, yang ditandai dengan penandatanganan MoU Kerja sama Industri Pertahanan di Jakarta. Naskah perjanjian ditandatangani oleh Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kepala Bagian Industri Pertahanan dan Teknologi Tiongkok (SASTIND) Chen Qiufa. Adapun pertemuan terkait kerja sama industri pertahanan dilakukan dalam tajuk *Defence Industri Cooperation Meeting* (DICM) (Kementerian Pertahanan, 2011).

Adapun pemilihan Tiongkok sebagai mitra kerjasama pertahanan Indonesia, khususnya kerjasama industri pertahanan pada tahun 2011, tidak luput dari pertimbangan strategis guna memenuhi kepentingan Indonesia dalam menghadapi masalah dan hambatan terkait penyelenggaraan sistem pertahanan dalam negeri pada saat itu. Salah satu masalah utama dalam perkembangan potensi pertahanan yang dihadapi oleh TNI Indonesia adalah kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bisa dibilang masih sangat terbatas dan tertinggal dari perkembangan teknologi. Selain kondisinya yang tidak memadai, jumlah alutsista yang tersedia juga masih terbilang rendah dan tidak mencukupi. Sampai pada tahun 2015, Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa kemampuan industri pertahanan nasional belum mampu untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan alpahankam dalam negeri. Dimana hal tersebut memunculkan ketergantungan pemenuhan dari luar negeri yang masih sangat dominan. Hal ini berarti sebagian besar pemenuhan kebutuhan alpahankam nasional, masih didukung dari luar negeri (Kementerian Pertahanan, 2015).

Mulai dari TNI-AU yang mengalami permasalahan terkait penerapan berbagai macam teknologi canggih (misalnya seperti kemampuan *stealth* dan penggunaan UAV) oleh angkatan bersenjata negara lain, yang dengan mudah akan dapat masuk dan melanggar kedaulatan wilayah territorial Indonesia. Selain itu, efek penggentar TNI-AU yang tercermin dari pesawat latih, pesawat heli, pesawat angkut, pesawat tempur, dan radar, juga mengalami kondisi tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang rendah, hanya 38,15 - 75 persen. Jumlah pesawat yang kadaluwarsa juga mencapai rata-rata 59,01 persen keseluruhannya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

Kondisi TNI-AL juga mengalami hal serupa. Alutsista yang digunakan oleh TNI-AL masih berupa kapal-kapal perang produksi lama (eks Jerman Timur dan Belanda). Dan bahkan untuk sebuah negara maritim yang luas, TNI-AL Indonesia hanya punya dua unit kapal selam yang belum bisa dibilang memadai dalam penyelenggara pertahanan wilayah laut Indonesia. Efek penggentar TNI-AL yang tercermin dari Kapal Republik Indonesia (KRI), kendaraan tempur marinir, dan pesawat patroli, selain jumlahnya yang terbatas, usia pakainya juga sudah relatif tua dengan kesiapan antara 33–65 persen. Sedangkan kondisi alutsista TNI-AD saat ini pada umumnya merupakan pengadaan lama yang dibuat antara tahun 1940-1986. Sebagian besar alutsista-alutsista ini suku cadangnya sudah tidak tersedia, bahkan pabrik pembuatnya sudah tidak memproduksi lagi (Subekti, 2012). Dukungan operasional TNI-AD juga masih menggunakan *Tank Scorpion* yang termasuk golongan *Light Tank* (tank ringan), padahal TNI-AD membutuhkan *Main Battle Tank* (MBT), pesawat *counter insurgency*, dan helikopter serbu (Rachmat, 2016).

Diperlukan teknologi pertahanan yang kuat bagi suatu negara dalam mempertahankan sistem pertahanan dan keamanannya. Karena teknologi pertahanan yang kuat bersumber dari industri pertahanan dalam negerinya, maka industri pertahanan bisa dibilang merupakan kunci dalam penyelenggaraan keamanan dan pertahanan bangsa. Salah satu hambatan utama dalam sistem pertahanan nasional dalam negeri adalah lemahnya perkembangan teknologi yang kemudian menghambat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Mayjen TNI (Purn) Poerwadi, menyatakan bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan teknologi modern pertahanan negara, TNI menghadapi beberapa hambatan yang utama diantaranya dari segi penelitian dan pengembangan (litbang), dan juga pengadaan.

Kebijakan negara terkait dengan pengembangan industri pertahanannya adalah komitmen untuk pengembangan penelitian dan pengembangan. UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan menyatakan 5 % dari keuntungan bersih industri pertahanan dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan (Litbang). Maka, bila mengacu pada standarisasi anggaran Litbang, negara sesedikitnya menganggarkan 2 % dari PDB, yang apabila dibandingkan dengan anggaran pertahanan Indonesia bahkan masih belum mencapai angka 1 % dari PDB, tepatnya 0,9 % dari PDB (Muradi, 2015). Catatan data dari World Bank untuk tahun 2011 juga menyatakan bahwa Indonesia hanya mengalokasikan 0,07% PDB untuk anggaran pertahanan dalam negeri (World Bank, 2011) . Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses menuju kemandirian industri pertahanan dengan SDM yang mumpuni belum berangkat dari tekad yang cukup

kuat. Minimnya anggaran untuk Litbang pun kemudian berdampak pada akses SDM industri pertahanan yang relatif terbatas.

Mulai dari pengalaman PT. Dirgantara Indonesia, yang merupakan salah satu catatan serius, dimana manajemen pernah merumahkan ribuan pegawainya merupakan cerminan dari ketidak-sehatan pengelolaan industri pertahanan di Indonesia. Eksodus para eks pegawai PT. DI kesejumlah industri pertahanan di Malaysia, Eropa dan Amerika Serikat mengindikasikan bahwa SDM industri pertahanan membutuhkan keberlangsungan pengembangan diri dan kesejahteraan yang memadai, agar SDM yang tersedia dapat bekerja dengan efektif (Muradi, 2015). Kemudian terkait masalah kualitas SDM, PT DI juga tidak selalu memperoleh proyek *maintenance* yang sama sehingga kemampuan SDM tidak berkembang dengan baik dari waktu ke waktu (Haryono, Swastanto, Siswo, Suhirwan, & Jupriyanto, 2022). Keterbatasan SDM inilah yang kemudian tentunya juga akan mempengaruhi keberhasilan kerja litbang, yang mana untuk meningkatkan fungsi kerja litbang perlu memiliki ahli dan pakar teknologi yang berkualitas (Indrawan & Widyanto, 2016).

Selain PT DI, PT Pindad juga mengalami permasalahan SDM yaitu masalah gap generasi. Sebelum krisis moneter 1998, PT Pindad telah banyak melakukan rekrutmen sehingga saat ini postur SDM sudah banyak yang memasuki masa akhir dan memerlukan regenerasi SDM. Sedangkan rekrutmen generasi milenial terhambat oleh belum terpenuhinya aspek *man-hours* perusahaan. Kualitas SDM dalam mengembangkan teknologi yang dimiliki juga sebagian besar berlatar belakang pendidikan setingkat SLTA. Dimana hal

tersebut merupakan tantangan bagi industri pertahanan agar bisa mengembangkan kemampuan SDM yang dimiliki terkait dilakukannya inovasi-inovasi dan penyerapan hasil *Transfer of Technology* (ToT) yang lebih maksimal (Haryono, Swastanto, Siswo, Suhirwan, & Jupriyanto, 2022).

Pada dasarnya, faktor utama dalam mencapai sistem pertahanan dan keamanan negara yang kuat adalah besarnya peranan perkembangan teknologi, dan kedua hal tersebut masih terbatas dan belum memadai di Indonesia. Karena dalam mencapai standart teknologi tertentu, sebuah negara juga harus memiliki industri pertahanan yang mendukung. Perkembangan teknologi pertahanan suatu negara akan sangat ditentukan oleh industri pertahanannya. Sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat, Industri Pertahanan diperlukan untuk menyediakan kebutuhan alutsista baik dalam konteks kualitas maupun kuantitas. Ada beberapa masalah yang biasanya didapati banyak negara dalam industri pertahanannya; Pertama, yakni masalah pengembangan teknologi pertahanan yang akan sangat ditentukan oleh dua skema yaitu skema perkembangan industri pertahanan dan pemaksimalan penelitian, serta pengadaan alutsista. Masalah kedua adalah masalah pendanaan. Masalah ketiga adalah masalah perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Industri Pertahanan-nya (Muradi, 2015). Jika diperhatikan, ketiga masalah diatas sebenarnya berkaitan satu sama lain dengan upaya pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Maka dari itu, berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas, yang dihadapi Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pertahanannya, dipilihlah Tiongkok sebagai salah satu mitra kerjasama industri pertahanan pada tahun 2011 dalam upaya pengembangan industri pertahanan di Indonesia. Terlepas dari

masalah-masalah diatas, pemilihan Tiongkok sebagai mitra juga tidak lepas dari faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan strategis Indonesia terkait kebijakan kerjasama industri pertahanan dengan Tiongkok.

Kondisi ekonomi dan militer dalam negeri merupakan salah satu pertimbangan utama dalam hal pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan. Penelitian tahun 2011, menyebutkan bahwa perkembangan kemampuan militer Tiongkok mengalami peningkatan pesat karena ditunjang oleh peningkatan ekonominya. Kapabilitas militer Tiongkok juga sudah mulai mengeksploitasi kemampuan inovasi dengan cara penggunaan bahan-bahan dan alat-alat yang canggih. Setiap tahunnya, Tiongkok mengalokasikan kurang lebih lima persen dari anggaran pertahanannya untuk program persenjataan strategis (Erwisyah, 2011). Kekuatan militer Indonesia ada diperingkat ke-17 sedangkan Tiongkok diperingkat ke-3 tepat setelah Amerika dan Rusia. Fakta ini menjadikan Tiongkok sebagai negara Asia dengan kekuatan militer terbesar. Melakukan kerja sama pertahanan dengan Tiongkok tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi sistem pertahanan Indonesia. Kerja sama ini juga diprediksi bisa memberikan pengaruh dan keuntungan terkait kekuatan militer, pertumbuhan ekonomi, serta citra/status Indonesia dalam tatanan internasional.

Mulai dari aspek kekuatan militer, Indonesia menerima keuntungan berupa peningkatan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman, maupun profesionalitas prajurit negara dalam hal menunjang penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat. Dalam artikel Yanyan Mochamad Yani tahun 2010, pemilihan Tiongkok sebagai mitra kerja sama Industri Pertahanan telah melewati kalkulasi kondisi lingkungan strategis. Salah satunya terkait embargo militer yang

pernah diterapkan AS di Indonesia sampai pada tahun 2005, yang mengakibatkan kapabilitas alutsista dalam negeri menurun pada masa itu. Sehingga Indonesia perlu untuk meningkatkan intensitas kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain agar dapat terlepas dari pola ketergantungan dengan AS.

Maka sejak awal era reformasi Indonesia sudah mulai melakukan pemenuhan kebutuhan vital peralatan militer melalui negara lain, salah satunya Tiongkok. Apalagi Tiongkok bisa menawarkan penyelesaian masalah yang dihadapi Indonesia terkait pemenuhan kebutuhan alutsista dan teknologi militer lainnya (Yani, 2010). Adapun pemenuhan kebutuhan alutsista dalam negeri salah satunya dilakukan dengan kerja sama industri pertahanan melalui mekanisme transfer teknologi. Dimana kedua negara akan sepakat untuk melakukan produksi dan pengembangan bersama terkait alat-alat militer tertentu. Melalui kerja sama industri pertahanan ini, terdapat kepentingan Indonesia untuk memperkuat postur pertahanannya melalui modernisasi teknologi dan kekuatan militer. Sehingga modernisasi kekuatan militer bisa mewujudkan industri pertahanan yang mandiri.

Selain itu, aspek ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam kerja sama industri pertahanan dengan Tiongkok. Friedrich Engels, menguraikan bahwa teknologi persenjataan modern, diatas segalanya, melambangkan kemajuan ekonomi. Yang kemudian didukung oleh pernyataan Joseph Schumpeter, yang menyebut bahwa teknologi merupakan komponen sentral dari daya saing ekonomi, yang bisa dilihat pada budaya dan praktik ekonomi Jepang, dimana pertumbuhan ekonomi Jepang merupakan buah dari pengelolaan yang tepat akan industri pertahanan dalam negerinya (Samuels, 1994, p. 16). Oleh

karena itu, pengembangan industri militer juga dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hal tersebut dimungkinkan karena berdampak positif pada sektor industri lainnya. Proses industrialisasi dapat mendorong perluasan dan modernisasi sektor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, seperti baja, peralatan mesin, dan perkapalan. Tapi tidak lupa, pendanaan dan sumber daya juga dibutuhkan oleh negara-negara untuk membangun industri pertahanan nasional mereka.

Oleh karena itu, tidak semua negara mampu mengelola industri pertahanan nasionalnya secara mandiri, banyak negara yang lebih memilih membeli perlengkapan dan peralatan militer yang mereka butuhkan dari negara lain, dan beberapa lainnya menjalin kemitraan dengan negara maju untuk memberikan bantuan pembiayaan untuk pengadaan peralatan militer. Fokusnya terletak pada tujuan nasional dengan mengakses teknologi asing dan menguasai teknologi (Aini & Triantama, 2021). Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang memilih untuk menjalin kerja sama dengan negara lain dalam upaya pengembangan kemampuan industri pertahanannya. Sedikitnya, bisa tercapai dua aspek ekonomi yang terbantu oleh keberadaan industri pertahanan yang kuat, diantaranya; aspek tenaga kerja dan neraca perdagangan (Lubabah 2018).

Disamping itu, kebijakan Indonesia dalam memilih Tiongkok sebagai mitra, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, salah satunya adalah karena bahan-bahan yang diperoleh dari Tiongkok lebih mudah didapatkan, juga didapat dengan harga yang lebih murah dibanding dengan negara-negara produsen senjata barat yang lain

seperti: Rusia dan Amerika (Wulandari, 2015, p. 201). Berdasarkan data laporan *European Union Institute for Security Studies Reports*, pasar senjata utama Tiongkok ada di Asia dan Timur Tengah, dan sekitar tiga perempat ekspor senjatanya dikirim ke negara-negara di kawasan ini. Sehingga banyak kesepakatan senjata Tiongkok telah dilakukan dengan 'harga persahabatan', yaitu menjual senjata dengan harga diskon. Perjanjian semacam itu telah dibuat baik untuk tujuan politik, yaitu memperkuat aliansi atau mempromosikan hubungan baik (Bitzinger & Popescu, *Defence Industries in Russia and China: players and strategies*, 2017). Senjata Tiongkok sering digambarkan kokoh, mudah dioperasikan, dirawat, dan cukup andal. Mengingat harganya yang terjangkau sehingga banyak negara dunia ketiga yang cocok dengan senjata yang dijual Tiongkok.

Selain itu perlu dicatat bahwa sejak lama, sebagian besar pelanggan utama Tiongkok ditekan untuk devisa, sehingga harga rendah dari senjata yang ditawarkan Tiongkok menjadi nilai jual yang menarik. Tidak diragukan lagi, penghematan bisa sangat besar. Menurut salah satu sumber, biaya tahun 1992 di pasar terbuka pesawat tempur MiG-29 Rusia adalah sekitar \$25 juta, sedangkan F-7M Tiongkok adalah \$2,5-\$4,5 juta (Eikenberry, 1995). Bisa dikatakan, pengurangan dalam biaya anggaran inilah yang merupakan salah satu keuntungan ekonomi yang dipertimbangkan Indonesia dalam memilih Tiongkok sebagai mitra.

Terlepas dari hal-hal diatas, kekuatan strategis yang dimiliki oleh suatu negara untuk menghadapi ancaman dan melakukan *deterrence* terhadap musuh memang bersifat esensial. Memiliki atau berusaha untuk memiliki industri persenjataan dalam negeri yang kuat, yang mampu merancang, mengembangkan, dan memproduksi sistem senjata modern, dipandang oleh banyak negara sebagai

elemen penting. Karena kemampuan kepemilikan peralatan militer yang mumpuni akan membuat negara lebih leluasa dalam membuat keputusan strategis di bidang pertahanan. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi senjata/peralatan militer juga mempengaruhi citra/statusnya di tingkat internasional. Karena sebuah negara yang memiliki angkatan bersenjata yang kuat, masih dapat dianggap tidak cukup kredibel jika memiliki ketergantungan pada negara lain untuk pasokan senjatanya.

Searah dengan hal tersebut, melalui kerja sama dengan Tiongkok, upaya kemandirian industri pertahanan akan terus digerakkan, melalui produksi dan pengembangan teknologi pertahanan yang unggul dan sejajar dengan perkembangan teknologi global. Pengembangan teknologi unggul dan kemandirian industri ini yang nanti kemudian diharapkan akan memberikan pengaruh positif akan citra/status Indonesia dalam konstelasi internasional.

Ketiga aspek diatas, mulai dari kekuatan militer, keuntungan ekonomi, sampai pencapaian citra/status, merupakan aspek-aspek yang menjadi motif Indonesia terkait kerja sama industri pertahanan yang dilakukan dengan Tiongkok. Hal ini searah dengan pernyataan Richard Bitzinger tentang konsep *technonationalist impulse*, dimana keputusan negara untuk melakukan pengembangan industri pertahanan nasional upaya akan peng-akumulasian power (*pursuit of power*), kekayaan (*pursuit of wealth*) serta meningkatkan *prestige* dari suatu negara (*pursuit of prestige*) (Bitzinger R. A., 2015).

Maka dari itu, kesepakatan kerja sama industri pertahanan antara Tiongkok dan Indonesia pun terus ditingkatkan dan dibahas dalam pertemuan *Defence Industry Cooperation Meeting* (DCIM) di Jakarta, diselenggarakan oleh

Kementerian Pertahanan Indonesia dengan *State Administration for Science, Technology and Industri China* (SASTIND) (Saragih, 2013). Dengan terjalinnya kerja sama militer ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan serta keamanan nasional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Motif Indonesia dalam Kerja Sama Industri Pertahanan dengan Tiongkok (Tahun 2011-2021)**” untuk mengetahui lebih lanjut apa saja motif dari kebijakan Indonesia dalam melakukan kerja sama pertahanan dengan Tiongkok sebagai mitra.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja motif Indonesia dalam kerja sama Industri Pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2011-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Objektif

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok khususnya dalam bidang Industri Pertahanan. Selain itu, dalam penerapan yang lebih spesifik, penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi apa saja motif Indonesia dalam kerja sama Industri Pertahanan dengan Tiongkok terkait Peningkatan Sistem Pertahanan Indonesia.

1.3.2. Tujuan Subjektif

1. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Tulisan ini dibuat sebagai sarana penulis untuk menuangkan wawasan sekaligus mengembangkan penerapan kajian ilmu hubungan internasional yang telah penulis dapatkan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam studi kajian Hubungan Internasional. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan bisa memberi manfaat bagi penulis pembaca maupun penulis sendiri, ataupun pihak-pihak lain yang terkait dalam tulisan ini. Adapun secara menyeluruh, manfaat dari penulisan penelitian atau skripsi terbagi menjadi dua; manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi kajian ilmu hubungan internasional di tanah air, khususnya yang berkaitan dengan isu produksi dan perkembangan alutsista ataupun sistem pertahanan negara secara menyeluruh, mengingat hal tersebut merupakan komponen penting bagi keamanan dan kepentingan nasional.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja hambatan terkait penyelenggaraan sistem pertahanan Indonesia pada tahun 2011-2021. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi apa saja motif-motif yang mempengaruhi Indonesia dalam memilih Tiongkok sebagai mitra

kerjasama Industri Pertahanan pada tahun 2011-2021 guna mengatasi masalah-masalah dalam sistem pertahanan dalam negeri pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011, Agustus 08). C-705 – Rudal Pamungkas Andalan Kapal Cepat TNI AL. *Indomiliter*, diakses dalam <https://www.indomiliter.com/c-705-rudal-pamungkas-andalan-kapal-cepat-tni-al/>.
- Aini, R. Q., & Triantama, F. (2021). The Implementation of South Korea's Military Technology Reform in The Perspective of Techno-nationalism. *Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 1*, 63-76.
- Amalia, M. R. (2016). Indonesia's Interest in Building Military Cooperation With Tiongkok in Producing The C-705 Missile. *Jom FISIP Volume 3 No. 2*.
- Ambarwati, E., Mahroza, J., & Supandi. (2019). Strategi Hedging dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus: Alih Teknologi Rudal C-705). *Jurnal Diplomasi Pertahanan Volume 5 Nomor 1*, 3.
- Arief, J., Sahabuddin, Z., & Hermanto, D. (2022). Pengaruh Investasi Industri Pertahanan Terhadap Pertahanan Negara Di Kawasan Asia. *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 1 No. 6*, 1027-1034.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-18.pdf>.
- Bitzinger, R. (2013). Revisiting Armaments Production in Southeast Asia: New Dreams, Same Challenges. *Contemporary Southeast Asia Vol. 35, No. 3*, 369–94.
- Bitzinger, R. A. (2009). *The Modern Defense Industry: Political, Economic, and Technological Issues*. California: ABC CLIO.
- Bitzinger, R. A. (2015). Defense Industries in Asia and the Technonationalist Impulse. *Contemporary Security Policy, Vol. 36 No. 3*, 453–472.
- Bitzinger, R. A., & Popescu, N. (2017). *Defence Industries in Russia and China: players and strategies*. Luxembourg: EU Institute for Security Studies.
- Bitzinger, R., & Popescu, N. (2017). *Defence Industries in Russia and China: players and strategies*. Luxembourg: EU Institute for Security Studies.
- Blasko, D. (2011). An Analysis of China's Defense Budget and Total Military Spending — The Great Unknown. *China Brief Volume: 11 Issue: 4*.
- Caverley, J. D. (2007). United States Hegemony and the New Economics of Defense. *Journal of Security Studies Vol. 16 No. 4*, 600.
- Ditamei, S. (2022, Agustus 1). Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya. *detikJabar* [<https://www.detik.com/jabar/berita/d->

6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya]
diakses pada 18 Februari 2023.

- Dutta, A. (2009). Role of India's Defence Cooperation Initiatives in Meeting the Foreign Policy Goals. *Institution of Defence and Analysis No. 3*.
- Eikenberry, K. W. (1995). *Explaining and Influencing Chinese Arms Transfers*. Washington D.C.: Institute For National Strategic Studies.
- Erwisyah, A. (2011). Pengaruh Modernisasi Militer China terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik. *Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia*, 58.
- Haryono, T., Swastanto, Y., Siswo, S., Suhirwan, & Jupriyanto. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Industri, dan Pemerintah dalam Industri Pertahanan Sebagai Bagian Penting dari Strategi Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara Volume 12 Nomor 1 Tahun*.
- Hughes, C. W. (2011). The slow death of Japanese techno-nationalism? Emerging comparative lessons for China's defense production. *Journal of Strategic Studies Vol.34, No.3*, 451–479.
- Indrawan, R. M., & Widiyanto, B. (2016). Kebijakan Offset dalam Membangun Kemandirian Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan Vol. 6 No. 2*, 29-49.
- Indrawan, R., & Widyanto, B. (2016). Kebijakan Offset dalam Membangun Kemandirian Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan Volume 6 Nomor 2*.
- Kementerian Pertahanan. (2011, Maret 25). Kemhan Adakan 1st Defense Industry Cooperation Meeting RI – China. *kemhan.go.id*.
- Kementerian Pertahanan. (2011, Maret 25). Kemhan Adakan 1st Defense Industry Cooperation Meeting RI – China. *kemhan.go.id*.
- Kementerian Pertahanan. (2015, July 20). Kebutuhan Alpalhankam Belum Sepenuhnya Didukung Industri Pertahanan dalam Negeri. <https://www.kemhan.go.id/>.
- Kemeterian Pertahanan . (2011). *PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2012*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/NOMOR%2020%20TAHUN%202011.pdf>.
- Khalid, M. A., & Mustapha, A. B. (2014). Military Expenditure and Economic Growth In The Case of China: Using ARDL Approach. *International Journal of Development and Emerging Economics Vol. 2 No.1*, 27-36.

- Komando Armada I. (2021, April 15). KRI Clurit-641 dan KRI Kujang-642 Sukses Tembakan Rudal C-705. *Komando Armada I*
<https://koarmada1.tnial.mil.id/artikel/detail/338-kri-clurit-641-dan-kri-kujang-642-sukses-tembakan-rudal-c-705>.
- Koseoglu, A. M. (2012). The Strategic Management of Defence Industry: A Science and Technology Based Configuration. *SSRN Electronic Journal*
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2128477>.
- Kurç, Ç., & Neuman, S. (2017). Defence industries in the 21st century: a comparative analysis. *Defence Studies Vol. 17 No. 3*, 219–227.
- Lie, J., & Samuels, R. (1995). Rich Nation, Strong Army: National Security and the Technological Transformation of Japan. *Pacific Affairs*, 598.
- Lubabah, R. G. (2018). Tingkatkan Nilai Tambah Indonesia, DPR Dorong Industri Pertahanan Dikembangkan. *Merdeka.com*
<https://www.merdeka.com/politik/tingkatkan-nilai-tambah-indonesia-dpr-dorong-industri-pertahanan-dikembangkan.html>.
- Melati, L. T., Utami, M., & Kasim. (2022). Pengembangan Konsep Technonationalism dalam Peningkatan Penguasaan Teknologi Industri Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1*.
- Mirdanies, M., Saputra, H. M., Subekti, R. A., Susanti, V., Nugraha, A. S., Rijanto, E., & Hartanto, A. (2013). *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Moloeng, L. J. (2006). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muradi. (2015). Model Pendanaan Industri Pertahanan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. *Universitas Pertahanan RI*.
- Muradi. (2015). Model Pendanaan Industri Pertahanan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pertahanan Vol 05 No 2*, 213.
- Mustari, M., & Rahma, M. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta.
- Nakayama, S. (2012). Techno-nationalism versus Techno-globalism. *East Asian Science, Technology and Society: An International Journal*, 13.
- Oemry, A. F. (2020). Analisis Yuridis Alih Teknologi dalam Pengadaan Alutsista Sebagai Upaya Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Page, J. (2017, July 17). Unable to Buy U.S. Military Drones, Allies Place Orders With China. *The Wall Street Journal*
<https://www.wsj.com/articles/unable-to-buy-u-s-military-drones-allies-place-orders-with-china-1500301716>).

- Parameswaran, P. (2018, Agustus 31). China-Indonesia Military Ties in Focus With Defense Industry Meeting. *The Diplomat*.
- Prima, A. (2012, Maret 30). Rudal C-705 Produksi Dalam Negeri untuk Pijakan Kemandirian di Bidang Rudal. *Lembaga Kajian Pertahanan Strategis: <https://lembagakeris.net/rudal-c-705-produksi-dalam-negeri-untuk-pijakan-kemandirian-di-bidang-rudal/>*.
- Rachmat, A. N. (2016). Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Achmad Yani bidang Kajian Keamanan Global dan Diplomasi Publik*, 199-212.
- Raska, M. (2017). Strategic Contours of China's Arms Exports. *RSIS Commentary No. 165*.
- Reic, R. B. (1987). *The Rise of Technonationalism*. Atlantic Montly.
- Sachar, B. (2004). Military Diplomacy Through Arms Transfers: A Case Study of China. *Institute for Defence Studies and Analyses: Strategic Analysis Vol. 28 No.2*, 290-310.
- Safitri, D. (2013, Juli). Kartu Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan. *BBC diakses dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130614_indonesiadefencedynamic.shtml*.
- Samuels, R. J. (1994). *Rich Nation Strong Armies*. London: Cornell University Press.
- Saragih, R. (2013, Agustus 22). Perkembangan Kerjasama Rudal C-705 China-Indonesia. . *Jakarta Greater: <https://jakartagreater.com/10371/perkembangan-kerjasama-rudal-c-705-china-indonesia/>*.
- Segev, H., & Riemer, O. (2019). Not a Flood, but a Rising Current: Chinese Weapons Sales to the Middle East. *The Institute for National Security Studies: Strategic, Innovative, Policy-Oriented Research*.
- Sinaga, L. C. (2013). *Hubungan Indonesia - China dalam Dinamika Politik, Pertahanan - Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Press.
- Singh, M., & Kumar, L. (2012). China's Defence Budget 2012: An Analysis. *IDS (Institute for Defence Studies & Analysis) Issues Brief Journal*, 2.
- Subekti. (2012). Modernisasi Alutsista TNI AD untuk Mencapai Kekuatan Pokok Minimum. *Jurnal Yudhagama Vol. 32 No.1*, 21.
- Tao, Z. (2018, February 27). In-depth: How China becomes third-largest supplier of weapons worldwide? *China Military Online*

http://eng.chinamil.com.cn/CHINA_209163/TopStories_209189/7953754.html.

- Tyroler-Cooper, S., & Peet, A. (2011). The Chinese aviation industry: Techno-hybrid patterns of development in the C919 program. *Journal of Strategic Studies*, Vol. 34, No. 3, 383–404.
- Witarti, D. I., & Armandha, S. T. (2015). Tinjauan Teoritis Konsepsi Pertahanan dan Keamanan di Era Globalisasi Industri Pertahanan. *Jurnal Pertahanan* Vol. 5 No. 3, 87-106.
- World Bank. (2011). *Military expenditure (% of GDP) - Indonesia*. The World Bank
[<https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2011&locations=ID&start=2000>].
- Wulandari, A. F. (2015). Kerjasama Indonesia-China: Transfer Teknologi Didang Industri Pertahanan (Studi Kasus Pembuatan Rudal C-705). *Jurnal Transformasi* No. 28 Vol. 2, 89-219.
- Yani, Y. M. (2010, Januari). MAKNA STRATEGIS KERJASAMA MILITER RI - CINA. *Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran* http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/makna_strategis_kerjasama_militer_ri-cina.pdf.
- Zay, A. (2016, September 16). Rudal C70: Yang Beli SBY, Yang di Bully Jokowi. *MiliterMeter.com* <https://militermeter.com/rudal-c705-yang-beli-sby-yang-dibully-jokowi/>.